



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Terbentuknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sejarah merupakan cikal bakal berdirinya suatu instansi pemerintah, tentu memiliki makna tersendiri seperti informasi yang penulis dapatkan lewat website resmi milik Pemprov DKI Jakarta, mengenai sejarah terbentuknya pemerintahan. Menurut website resmi www.jakarta.go.id (2017) menjelaskan bahwa sejarah terbentuknya Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bermula pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Kemudian setelah memasuki masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Jakarta tetap ada namun tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Kemudian pada masa Pemerintahan Hindia Belanda sampai masuk abad ke-20, Kota Batavia dikenal sebagai suatu kepemimpinan yang bersifat keresidenan, dengan kepala pemerintahan seorang residen. Keresidenan ini secara *administratife* dibagi ke dalam *afdeling-afdeling* yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen.

Pembagiannya adalah sebagai berikut: Afdeling Kota Batavia (*Stad envoorsreden van Batavia*), *Afdeling Meester Cornelis* (kini Jatinegara), Afdeling Tangerang, *Afdeling Buitenzorg* (kini Bogor), dan Afdeling Krawang. Afdeling Kota Batavia dan sekitarnya, pada perkembangannya menjadi kotapraja (*Gemeente*). Kebijakan ini dicanangkan pada abad ke-20. Dalam pengaturan pada saat itu, batas wilayah Afdeling Batavia terdiri atas 4 distrik, yaitu Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar, dan Tanah Abang. Dalam proses pemekaran kota, pada dekade keempat abad tersebut *Afdeling Cornelis* digabungkan ke dalam batas-batas *Gemeente* Batavia.

Memasuki tahun 1903, Batavia dibawah pemerintahan pusat, pengaturan pemerintahan harus melalui jenjang yang berliku dan cenderung berlarut-larut sampai munculnya gagasan untuk memberlakukan desentralisasi di Batavia sehingga terbit

kebijakan Peraturan Desentralisasi tertanggal 23 Juli 1903. Berdasarkan peraturan ini, rintisan ke arah pelaksanaan pengaturan hak dan kewajiban pemerintahan untuk pemerintah daerah dimulai. Upaya ini membutuhkan waktu selama dua (2) tahun sampai Batavia dikukuhkan sebagai kotapraja (*gemeente*). Batavia adalah *gemeente* yang pertama di Hindia Belanda.

Berdasarkan Stb (*Staatsblad*) 1905 no. 204 tanggal 18 Maret 1905 dan berlaku mulai 1 April 1905, Batavia menjadi kotapraja. Tidak lama setelah menerima status baru, Batavia mulai menata perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan. Penataan ini meliputi pembentukan struktur dan lembaga pemerintahan daerah yang diperlukan untuk memulai dan melancarkan pengembangan kota.

Penetapan Batavia sebagai kotapraja pada tanggal 1 April 1905 memberikan kota yang sedang berkembang itu suatu aparat pemerintahan sendiri, hingga memungkinkan penanganan masalah secara lebih baik dan efisien. Melengkapi pemerintahan kotapraja, suatu Dewan Kota (*de Gemeenteraad van Batavia*) dibentuk dengan anggota 25 orang. Pemimpin Dewan Kota adalah kepala daerah setempat, menurut ordonansi (undang-undang) pembentukan pemerintahan daerah tersebut. Untuk itu, sebagai ketua Dewan Kota yang pertama adalah Asisten Residen Batavia Kota dan sekitarnya. Selanjutnya keluar pengaturan yang menyatakan, bahwa untuk kotapraja tertentu dapat diangkat ketua Dewan Kota secara tersendiri oleh gubernur jenderal, yang disebut sebagai walikota (*burgemeester*). Walikota Batavia yang pertama ditunjuk Mr. G. J. Bisschop. Nama walikota pertama ini diabadikan untuk sebuah kawasan pemukiman elite Eropa yakni *Bisschapplein*. Sejak tahun 1922 setelah terbit peraturan tentang Pembaharuan Pemerintahan yang mengatur Undang-undang pemerintah daerah, berdasarkan Undang-undang *Stadsgemeente* 1926 (*Stadsgemmente Ordonansi*, disingkat SGO 1926) Batavia ditetapkan menjadi *stadsgemeente*. Otoritas *Stadsgemeente Batavia*, yang memiliki otonomi dibawah Provinsi Jawa Barat (*West Java*), meliputi Distrik Batavia dan Weltevreden.

Menurut Hetifah (2009, h.1) *Governance* disini diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Pada masa pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan di bidang pengetahuan pemerintahan. Kepemimpinan Kota Batavia yang kemudian diganti menjadi Jakarta diserahkan kepada bangsa Indonesia. Susunan pemerintahan daerah itu adalah:

- Kepala Pemerintahan: H. Dahlan Abdullah
- Sekretaris Kotapraja: Soepomo
- Kepala Pekerjaan Umum: Abdurrachman
- Kepala Kesehatan dan Kehewan: dr.Nastap
- Kepala Urusan Pasar: Surioputro
- Kepala Urusan Kas Kotapraja: Suradji

Berdasarkan UD no. 28 kotapraja Batavia diubah menjadi *Tokubestu Shi*. Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta atau lengkapnya Jakarta *Tokubestu Shi*, yang berada langsung dibawah kekuasaan *Gunseikan*, kepala tertinggi Pemerintahan Bala Tentara Jepang di daerah pendudukan. Pada masa pendudukan Jepang, Pulau Jawa dikuasai oleh Bala Tentara ke-16 Kemaharajaan Jepang. Sehingga, kepala pemerintahan diambil-alih oleh Jepang dan secara resmi nama Jakarta disebut *Tokubetsu Shicoo*. Pemangku jabatan itu yang pertama adalah Tsukamoto dan yang terakhir adalah Hasegawa.

Sementara itu Kotapraja Jakarta dibagi ke dalam Kawedanan Jakarta Kota yang terdiri atas Penjaringan *Son* dan Tanjung Priok *Son*, dan Kawedanan Jakarta terdiri atas Pasar Senen *Son*, Tanah Abang *Son*, dan Jatinegara *Son*. Pemerintahan kotapraja pada akhir tahun 1943 terdiri atas kantor-kantor dengan bidang Urusan Umum, Urusan Ekonomi, Urusan Pengajaran, Kemakmuran dan Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Bersamaan itu pula Kotapraja Jakarta dibagi ke dalam distrik-distrik Penjaringan,

Gambir, Jatinegara, Pasar Senen, Tanah Abang, Mangga Besar, dan Tanjung Priok. Kepala distrik dijabat oleh bangsa Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Kotapraja Jakarta, seperti ditetapkan oleh pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

- Pimpinan Umum: Suwirjo
- Wakil Pimpinan Umum: Bagindo Dahlan Abdullah
- Sekretaris Kota: Suratno Sastroamidjojo

Untuk memperlancar roda pemerintahan, ditetapkan 10 jabatan yang terdiri Pamongpraja, Ekonomi, Sosial Pengajaran dan Pendidikan, Teknik, Kesehatan-kesehatan, Penerangan, Kepolisian dan Kejaksanaan. Selanjutnya, Kotapraja Jakarta dibagi ke dalam 7 wilayah kawedanan, yang menyangkut daerah kepolisian pula, yakni Penjaringan, Mangga Besar, Tanah Abang, Tanjung Priok, Gambir, Pasar Senen, dan Jatinegara.

Kemudian perkembangan Kota Jakarta menghadapi berbagai dinamika sejalan dengan revolusi perang kemerdekaan. Ibukota negara dipindah ke Yogyakarta namun tidak berapa lama, Belanda yang tidak mampu mempertahankan keberadaannya di bumi Indonesia dalam lingkup Republik Indonesia Serikat. Suatu peristiwa penting yang terjadi di Jakarta yang perlu dicatat adalah upacara pengakuan dan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Selain di Amsterdam yang dilakukan oleh Juliana, Ratu Kerajaan Belanda, kepada delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta, di Jakarta berlangsung hal serupa oleh wakil tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Dr. AHJ Lovink kepada wakil RIS Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Peristiwa ini berlangsung di *Koningsplein* (Istana Gambir atau kini Istana Negara).

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Tujuh yang dibentuk untuk menyusun administrasi Kota Jakarta dalam rangka menghindari kekosongan pemerintahan, wilayah Kota Jakarta dibagi 6 Kawedanan yaitu Penjaringan, Tanjung Priok, Gambir, Matraman, Kebayoran dan Kramat Jati; dan terdiri 20 kecamatan meliputi Cengkareng, Penjaringan, Krukut, Manggadua, Sawah Besar, Tanjung Priok,

Gambir, Tanah Abang, Petamburan, Matraman, Senen, Salemba, Pulo Gadung, Kebayoran, Kebon Jeruk, Kampung Melayu, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pasar Rebo, dan Pulau Seribu.

2.1.2 Arti Lambang



Gambar 2.1. Logo Instansi Pemprov DKI Jakarta

Sumber. www.jakarta.go.id

Arti Gambar dan Lambang Daerah

Berikut ialah arti dari Lambang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang diperoleh dari website resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Keistimewaan kota Jakarta yang dikenal sebagai kota revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan "Tugu Nasional" dimana mengartikan kemegahan dan daya juang, serta cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam.

- "Tugu Nasional" ini dilingkari oleh untaian padi dan kapas, dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan

Bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokoh erat.

- Dibagian bawah terlukis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari Kota dan negeri kepulauan Indonesia.
- Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar warna biru, warna angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta darnai bangsa Indonesia.

Tentang arti bentuk lukisan serta warna masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Makna Bentuk Lambang

Bentuk	Makna
Pintu gerbang	Lambang kota, lambang kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan intemasional.
Tugu Nasional	Lambang kemegahan, daya-juang dan cipta.
Padi/kapas	Lambang kemakmuran.
Tali emas	Lambang pemersatuan dan kesatuan.
Ombak laut	Lambang kota, negeri kepulauan.
Sloka “Jaya Raya”	Slogan perjuangan Jakarta
Bentuk perisai segi lima	Pancasila

Sumber : Perda No.6 Tahun 1963

Tabel 2.2 Warna dan Makna Lambang

Warna	Makna
Mas pada pinggir perisai	Kemuliaan Pancasila.
Merah sloka	Kepahlawanan
Putih pintu gerbang	Kesucian
Putih tugu nasional	Kemegahan kreasi mulya
Kuning padi/hijau putih kapas	Kemakmuran dan keadilan
Biru	Angkasa bebas dan luas
Ombak putih	Alam laut yang kasih.

Sumber : Perda No.9 Tahun 1964

2.1.3 SLOGAN

“Jaya Raya (Jaya dan Agung)”

Menurut website resmi www.jakarta.go.id dasar Pancasila dan seluruh yang berada didalam pintu gerbang itu, terteralah kemegahan yang sederhana. Sloka ‘Jaya Raya’ satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan Jakarta Raya, sebagai Ibu-kota dan kota perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara “Pancasila”.

2.1.4 Visi dan Misi

Visi :

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Misi :

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

2.1.5 Website Instansi dan Website Pelayanan Jakarta

Bentuk pelayanan lain yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat antara lain berupa website layanan masyarakat Jakarta. Website Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) resmi yang dapat diakses masyarakat setiap saat, website tersebut berisi mengenai informasi lengkap seputar Pemprov DKI Jakarta dan juga membantu masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

Lattimore, dkk. (2007, hal. 368) mengatakan *“By making all appropriate information available on the Web site along with accompanying links means the customers, media reporters, investor, industry analysts, employees, government regulations, activists, and other can get whatever information they want and put it together in any order they want without going through the public relations practitioners.”*

Berikut adalah tampilan website resmi dari Pemprov DKI Jakarta yang berfungsi sebagai media komunikasi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain:

www.jakarta.go.id

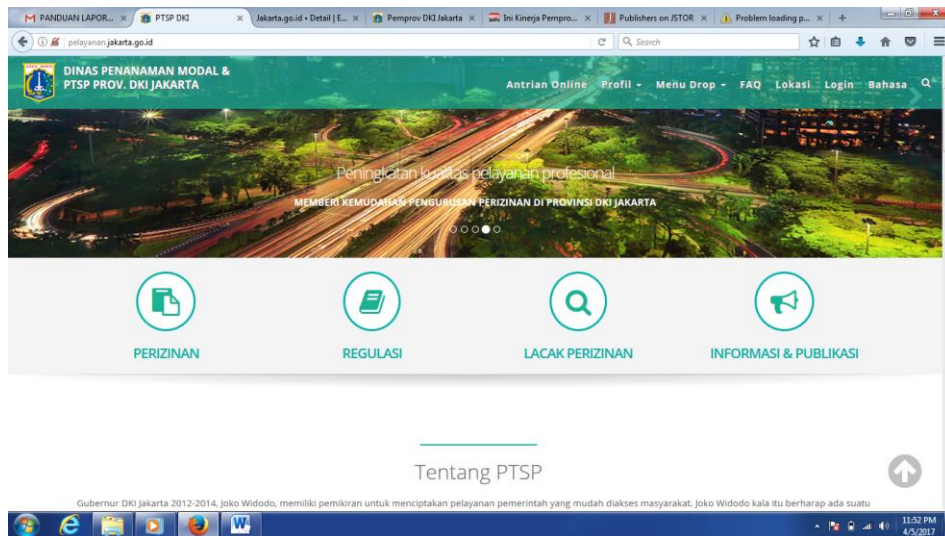
Gambar 2.2 Tampilan Website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Sumber : www.jakarta.go.id

Berikut adalah tampilan website resmi dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), yang di ciptakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitas bagi warga Jakarta dan berfungsi sebagai solusi perizinan bagi warga Jakarta, antara lain: www.pelayanan.jakarta.go.id

Gambar 2.2 Tampilan Website Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : www.pelayanan.jakarta.go.id

2.1.6 Pemerintahan Umum

Dalam penyelenggaraan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perangkat daerah lain yang mewakili tiap daerahnya. Seperti para walikota di berbagai daerah seperti Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan dan Utara. Selain itu, penulis melihat kini kinerja Pemerintah DKI Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya artikel pemberitaan yang menuliskan beberapa program kinerja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama tahun 2016.

Deti (2017, para. 6) menuliskan adanya kinerja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu pembangunan 3 unit *flyover*, 3 unit *underpass*, penyelesaian pembangunan jalan layang busway Kapten Tendean-Blok M-Ciledug, penyelesaian peningkatan jalur busway seluas 12.714 meter dengan panjang 3.532 meter, *separator* busway sepanjang 130.706 meter, lalu peningkatan armada Trans-Jakarta yang beroperasi sebanyak 1.065 bus, pembangunan jembatan di DKI Jakarta sebanyak delapan jembatan, serta penyelesaian peningkatan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu, juga dilakukan, pembangunan sarana prasarana transportasi pendukung

penyelenggaraan Asian Games 2018 yakni LRT Kelapa Gading-Rawamangun, Kamis (6/4).

Berikut ialah tampilan fisik gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mana menjadi kantor pusat bagi Gubernur dalam melaksanakan tugasnya.

Gambar 2.3 Gedung Pemprov DKI Jakarta

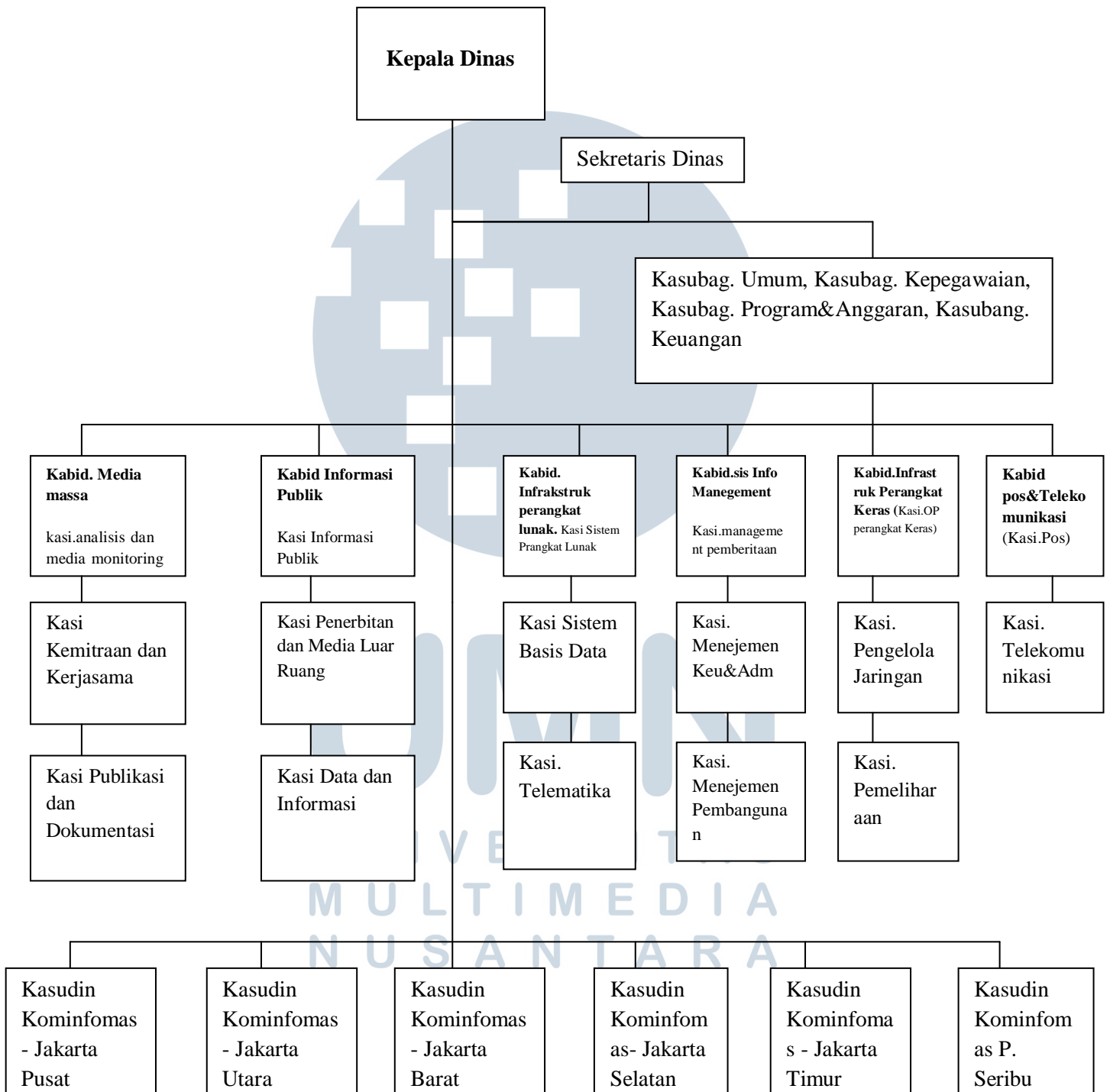


Sumber. Merdeka.com 18 Desember 2013

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

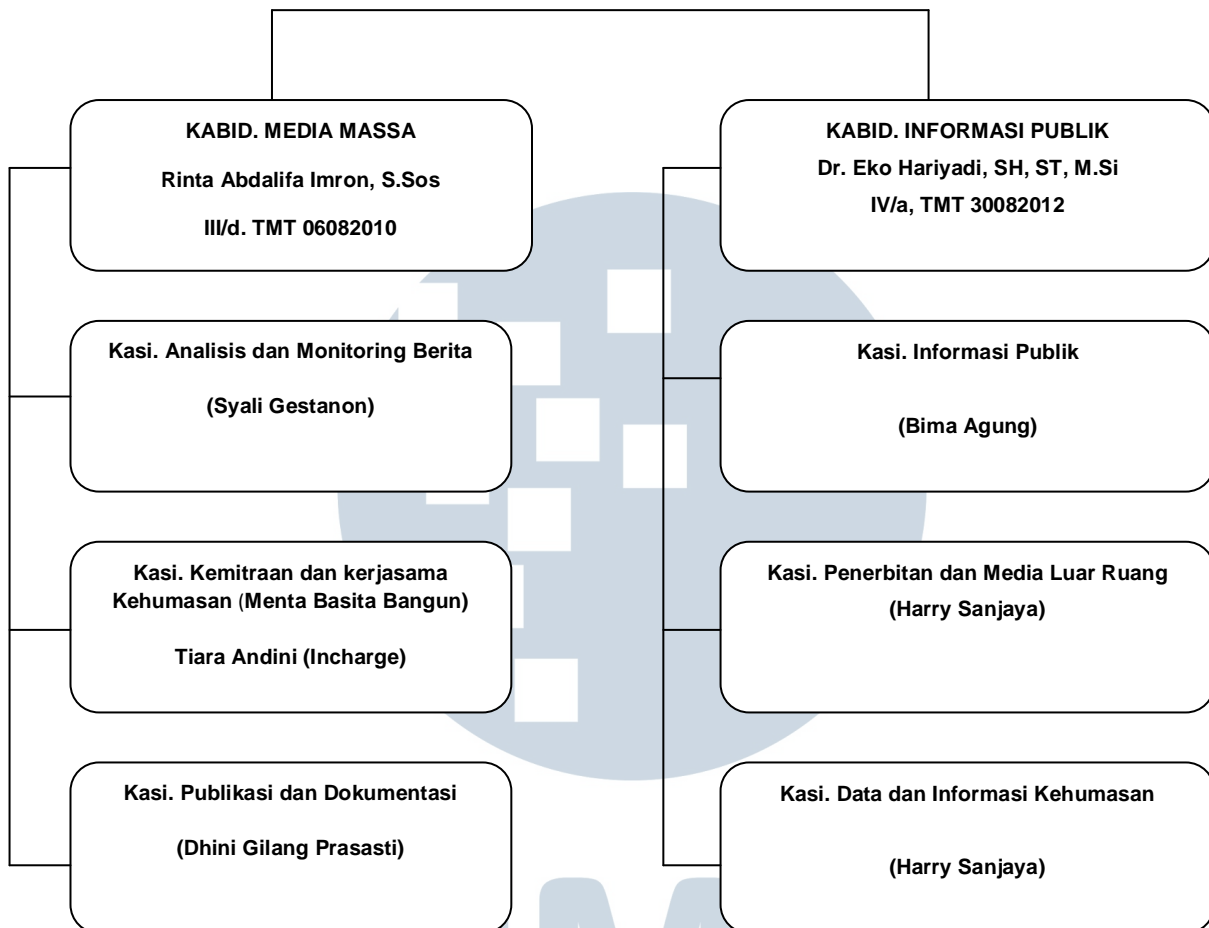
2.2 Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



2.2.1 Struktur Divisi Kehumasan

Gambar 2.5 Struktur Divisi Kehumasan



Sumber: Arsip Pribadi

2.2.1 Ruang Lingkup Divisi Terkait :

Penjelasan Tugas :

Bedasarkan kepada fungsi dan tugas pokok, setiap Seksi bagian humas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 6 Kasi, yang bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan kehumasan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan segala bentuk *public policy* dari Pemprov DKI Jakarta.

1. Kasi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan

- Kegiatan menyangkut tentang bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menjalin hubungan baik dengan berbagai media atau perusahaan lokal dan nasional. Seperti media Berita Jakarta dan I-Radio. Serta membuat berbagai macam acara terkait kegiatan Pemprov DKI Jakarta, serta mendistribusikanya kepada mitra sejenis dan masyarakat.
- Menyebarkan undangan acara untuk mempublikasikan informasi mengenai kegiatan yang diseleggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

2. Kasi Analisis dan Monitoring Berita

- Kegiatan Monitoring seluruh pemberitaan terkait infrastruktur dan kinerja Pemprov DKI Jakarta di 11 Media Massa baik Cetak dan Online maupun Televisi.
- Membuat Program Kerja setiap minggu dengan cara menyaring setiap hari pemberitaan mengenai Pemprov dan akan dirapatkan setiap hari Selasa agar masalah yang ditemukan dapat naik kepada gubernur agar dilanjutkan cara penyelesaiannya.

3. Kasi Dokumentasi dan Publikasi

- Kegiatan peliputan berita sebagai arsip negara yang harus dikelola oleh kasi ini serta pembuatan dokumenter seputar kehidupan di DKI Jakarta untuk dijadikan produk tayangan iklan layanan masyarakat di Televisi dan Website Pemprov DKI

4. Kasi Informasi Publik

- Kegiatan jurnalistik yang dilakukan dan memiliki 6 tim, yang masing-masing tim terdiri atas 3 jurnalis yang

bertugas mencari berita diseluruh titik yang ada DKI Jakarta. Bahan yang didapat akan dinaikan ke dalam pemberitaan yang ada di media lokal milik Pemerintah yaitu Berita Jakarta (BJ).

5. Kasi Data dan Informasi

- Kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga ahli, dimana mereka direkrut langsung oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meng-*input* seluruh data warga DKI Jakarta baik itu data kependudukan, kemiskinan, dan segala tata ruang kota.

6. Kasi Penerbitan dan Media Luar Ruang

- Berisi kegiatan memproduksi Majalah Cetak lokal Pemprov DKI Jakarta, yang diluncurkan tiap 6-12 bulan sekali dan berisikan tentang keberagaman dan daya tarik dari kota Jakarta.

